



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCHAMMAD SUHARYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUBAUDITORAT
3. NHK : 411009

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.830.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/120 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 410.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 589.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BBS_R M/T SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 6.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	127.601.491
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.552.601.491
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.552.601.491

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.